

Laporan Pelaksanaan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

(Good Corporate Governance)

2014

PT. BANK BPD DIY

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan - *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu tata kelola yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. PT. Bank BPD DIY, sebagai bank yang selalu tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa pentingnya GCG lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun selalu berupaya menjadikan GCG sebagai budaya. Dengan memahami dan menjalankan budaya GCG, akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PT. Bank BPD DIY dalam bisnis dan pencapaian visinya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG untuk melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Dalam rangka hal tersebut, PT. Bank BPD DIY menerapkan pelaksanaan GCG berdasarkan lima prinsip dasar, yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi, yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pelaksanaan prinsip dasar tersebut secara konsisten, PT. Bank BPD DIY akan mencapai peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pemantauan kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka peraturan yang berlaku.

PERGANTIAN SUSUNAN DIREKSI

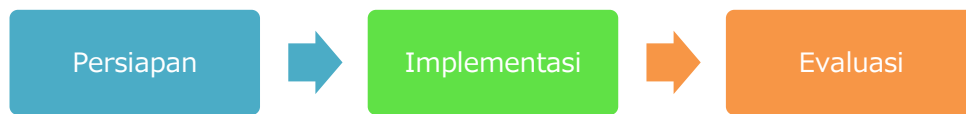
Pada tahun 2014 terjadi pergantian susunan Direksi PT. Bank BPD DIY. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank BPD DIY yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2014, diputuskan pergantian susunan Direksi periode 2013 – 2017 kepada Direksi 2014 – 2018 dengan susunan sebagai berikut :

Jabatan	Direksi Periode 2014 – 2018
Direktur Utama	Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.
Direktur Pemasaran	Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.
Direktur Umum	Drs. Cahya Widi, M.M.
Direktur Kepatuhan	Drs. Santoso Rohmad, M.M.

Pelaksanaan GCG yang baik telah diterapkan selama kepemimpinan Direksi Periode 2013 – 2017. Hal tersebut akan menjadi pondasi yang kuat untuk pelaksanaan GCG yang lebih baik pada masa kepemimpinan Direksi Periode 2014 – 2018.

KEBIJAKAN GCG

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, PT. Bank BPD DIY melakukan penahapan berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan serta tingkat kesiapannya. Dengan tahapan tersebut, diharapkan penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Tahap-tahap dalam penerapan GCG adalah sebagai berikut :



Pada tahap persiapan, PT. Bank BPD DIY membentuk suatu kebijakan dalam rangka menanamkan budaya GCG pada seluruh jenjang organisasi dan setiap kegiatan usaha. Kebijakan yang dibentuk terdiri dari 9 (sembilan) faktor yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Pembentukan, susunan anggota dan pelaksanaan tugas komite-komite.
4. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor intern dan auditor ekstern.
5. Penerapan manajemen risiko.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
7. Rencana streategis bank.
8. Aspek transparansi kondisi bank.
9. Etika perilaku pengurus dan pegawai bank.

Tahap implementasi merupakan upaya manajemen untuk melakukan perubahan guna perbaikan pelaksanaan GCG. Oleh karena itu, pada tahap ini PT. Bank BPD DIY melakukan sosialisasi dan internalisasi. Sosialisasi tentang budaya GCG disampaikan kepada seluruh jajaran struktural maupun fungsional unit kerja yang ada. Sedangkan pada tahap internalisasi, PT. Bank BPD DIY memastikan diharapkan pelaksanaan GCG bukan sekedar dipermukaan atau kepatuhan saja, namun benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

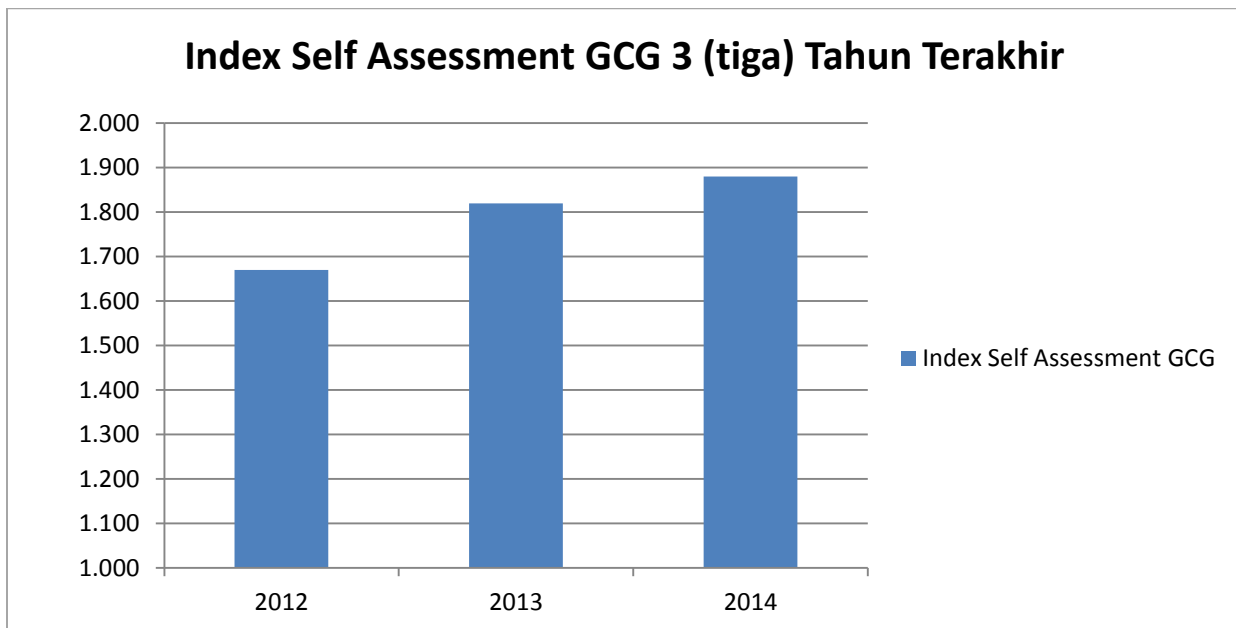
Pada tahap evaluasi, PT. Bank BPD DIY memperoleh hasil penilaian Bank Indonesia atas pelaksanaan GCG. Hasil dari penilaian tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas pelaksanaan GCG. Selain penilaian Bank Indonesia, setiap semester bersamaan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank, dilakukan GCG *Self Assessment*, yang meliputi pengukuran dan pemetaan penerapan GCG sehingga dapat diidentifikasi aspek-

aspek yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hasil dari proses tersebut, PT. Bank BPD DIY melakukan penyempurnaan pelaksanaan serta pedoman tata kelola perusahaan.

HASIL PENILAIAN SENDIRI GCG

Hasil GCG *Self Assessment* PT. Bank BPD DIY selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Semester	I	II
<i>Index Self Assessment GCG Score</i>	1,82	1,88

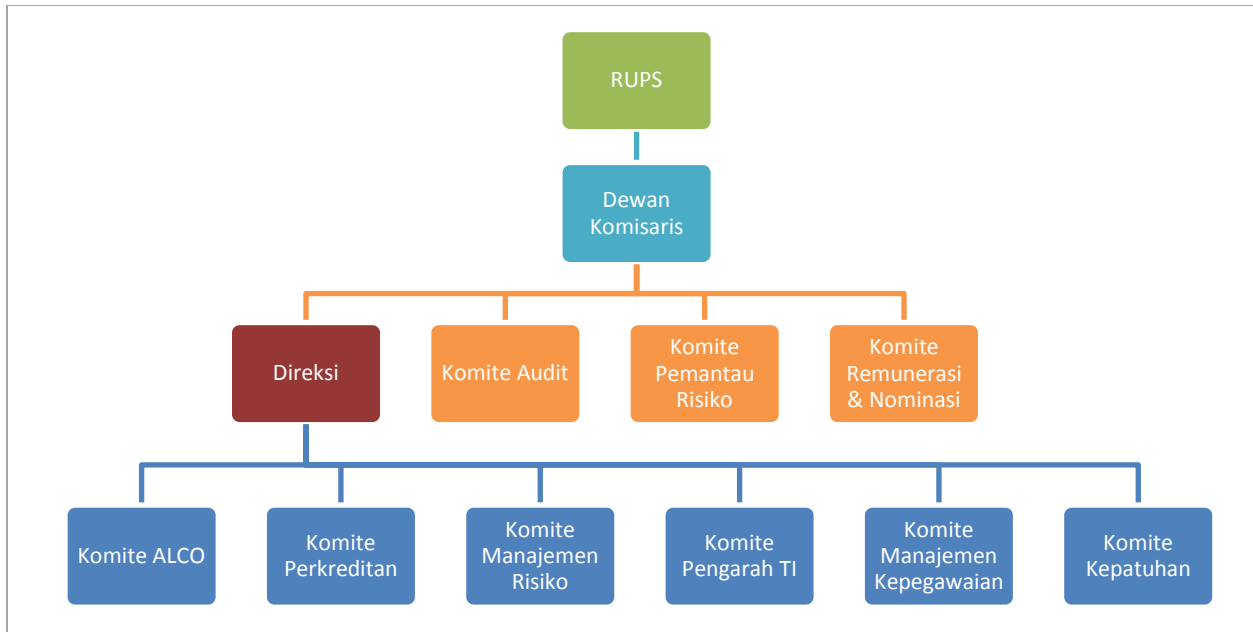


Nilai Komposit (N)	Predikat Komposit
$1,00 < N \leq 1,79$	Sangat Baik
$1,80 < N \leq 2,59$	Baik
$2,60 < N \leq 3,39$	Cukup Baik
$3,40 < N \leq 4,19$	Kurang Baik
$4,20 < N \leq 5,00$	Tidak Baik

PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GCG

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, struktur organisasi GCG PT. Bank BPD DIY disusun sebagai berikut :



B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS bersifat independen dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi Bank. Pemegang Saham PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Jabatan
1.	Hamengku Buwono X	Gubernur DIY
2.	Drs. H. Haryadi Suyuti	Walikota Yogyakarta
3.	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.	Bupati Sleman
4.	Hj. Sri Surya Widati	Bupati Bantul
5.	Hj. Badingah S.Sos.	Bupati Gunungkidul
6.	dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)	Bupati Kulon Progo

Berdasarkan Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 5 April 2013, RUPS meliputi RUPS Tahunan dan RUPS lainnya/Luar Biasa. Ruang lingkup RUPS meliputi :

1. Penilaian laporan pertanggung jawaban Direksi.
2. Persetujuan serta pengesahan Neraca dan Rugi/Laba Bank.
3. Pemilihan/pencalonan, penilaian Direksi.
4. Penentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Saham yang meliputi Daftar Saham, pemindah tanganan saham, duplikat saham, dan sebagainya.
5. Pembahasan hal-hal yang prinsip dan mendasar bagi kelangsungan pengelolaan Bank.

Selama tahun 2014, RUPS dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali, dengan uraian sebagai berikut:

Tanggal	No.	Materi
17 Januari 2014	1.	Membahas tentang surat pengunduran diri Direktur Utama PT. Bank BPD DIY.
	2.	Lain-lain.
27 Januari 2014	1.	Penugasan Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan dan mengusulkan calon direksi
	2.	Penugasan Direksi yang ada untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam hal Direksi baru belum terbentuk.
14 Maret 2014	1.	Laporan Dewan Komisaris tentang hasil seleksi calon Direksi PT. Bank BPD DIY.
25 Maret 2014	1.	Laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY, persetujuan neraca, perhitungan laba/rugi untuk tahun buku 2013.
	2.	Pengesahan setoran modal, pembagian deviden dan Dana Pembangunan Daerah.
	3.	Penunjukan Auditor.

	4.	Lain-lain.
23 April 2014	1.	Penetapan keputusan pergantian Direktur Utama
	2.	Pembatasan kebijakan strategis kepada Plt. Direktur Utama
21 Agustus 2014	1.	Pemberhentian dengan hormat Direksi yang sedang bertugas.
	2.	Penetapan Direksi baru secara definitif untuk periode 2014 - 2018
16 Desember 2014	1.	Pengesahan setoran modal masing-masing pemegang saham.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY diputus dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemilihan Dewan Komisaris telah melalui seleksi sesuai dengan ketentuan regulasi tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

a. Susunan Dewan Komisaris

Selama tahun 2014, tidak terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang sebanyak 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi. Susunan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY		
Periode Januari - Desember 2014		
No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	Komisaris Utama (Independen)
2	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	Komisaris (Independen)
3	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY			
Periode Januari - Desember 2014			
No.	Nama	Jabatan	Dokumen
1	Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	Komisaris Utama	- Surat Keputusan Gubernur No. 176/KEP/2012 tanggal 28 Mei 2012 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012 – 2015
2	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	Anggota	- Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2, tanggal 5 April 2013
3	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Anggota	

b. Tugas, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan Akta Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3 Tanggal 13 September 2013.

1) Tugas Dewan Komisaris:

- a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- d. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :

- 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- 2) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, Hasil Pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- c. Kriteria Dewan Komisaris
- Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan telah dinyatakan lulus dalam *Fit and Proper Test* dan mendapat persetujuan RUPS.
- d. Rapat Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan dapat menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
 - 2) Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan Komisaris Utama selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan.

- 3) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan, maka Komisaris Utama dapat menunjuk salah seorang anggota untuk memimpin rapat.
- 4) Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
- 5) Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- 6) Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan (termasuk jika terdapat perbedaan pendapat/*dissenting opinion*) dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat berita acara. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir.

e. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat dengan Direksi dengan sebagai berikut:

- 1) Pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu atas undangan Komisaris Utama dan atau permintaan Direksi.
- 2) Acara rapat/pertemuan dimaksud, ditetapkan oleh Komisaris Utama dan atau permintaan Direksi.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY Tahun 2014				
No.	Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Juml. Kehadiran	% Kehadiran
1.	Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	13	12	92%
2.	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	13	13	100%
3.	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	13	12	92%

Tanggal	Materi Rapat Dewan Komisaris
01-Jan-14	Telaah Surat Direktur Utama
23-Feb-14	Pembahasan proses seleksi Direksi
08-Mar-14	Pembahasan Hasil Wawancara Calon Direksi
05-Apr-14	Tindaklanjut Surat Direksi No. 2880/OM 0101 tgl 3 April 2014
08-Apr-14	Pembahasan tindaklanjut Surat Dewan Komisaris No. 036/DK/IV/2014 tgl. 05 April 2014
18-Apr-14	Pembahasan tindaklanjut Surat Dewan Komisaris No. 036/DK/IV/2014 tgl. 05 April 2014
20-Apr-14	Pembahasan aspek hukum dalam pengambilan keputusan tentang Pemberhentian Direktur Utama & Penetapan Plt. Direktur Utama
07-Jun-14	Laporan Hasil Fit & Proper Test
12-Jun-14	Persiapan RUPSLB
21-Agt-14	Pembahasan Hasil RUPSLB
19-Okt-14	Kebijakan Umum Direksi dan Kinerja
02-Nov-14	1. Kajian SK Pengangkatan Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kinerja 3. Remunerasi 4. Perubahan logo
30-Nov-14	Remunerasi Direksi 2013 - 2017

f. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris telah melakukan beberapa kali rapat dengan Direksi untuk memberikan rekomendasi. Adapun rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi selama tahun 2014, adalah sebagai berikut:

No.	Surat Keputusan	Perihal
1	SK No. 003 /KPTS/DP/2014 Tanggal 28 November 2014	Persetujuan dan Pengesahan Pedoman Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .

g. Pelatihan / Seminar yang diikuti Dewan Komisaris

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa kali pelatihan / seminar. Adapun pelatihan / seminar yang telah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis Pelatihan/Seminar
1	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. (Anggota Dewan Komisaris)	Seminar “Prospek Ekonomi Indonesia 2015”, Komite Ekonomi Indonesia, 17 Oktober 2014.

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank untuk mencapai kinerja yang optimal dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian.

a. Susunan Direksi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yaitu:

- 1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;
- 2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
- 3) Manajemen dipimpin oleh Direktur Utama.

Berdasarkan pada Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2, tanggal 5 April 2013, susunan Direksi PT. Bank BPD DIY pada periode Januari – April 2014 adalah sebagai berikut :

Direksi PT. Bank BPD DIY		
Periode Januari - April 2014		
No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Supriyatno, M.B.A.	Direktur Utama
2	Drs. Bambang Setyo Pranoto	Direktur Pemasaran
3	Priyono, S.E.	Direktur Umum
4	Drs. Wahib Susanto, M.M.	Direktur Kepatuhan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 6, tanggal 23 April 2014, tugas Direktur Utama PT. Bank BPD DIY dirangkap oleh Direktur Umum.

Pada tanggal 21 Agustus 2014 telah dilaksanakan RUPS dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Akta Addendum Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah DIY, Nomor 6 tanggal 12 September 2014 yang menyatakan susunan Direksi periode September – Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Direksi PT. Bank BPD DIY		
Periode September - Desember 2014		
No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.	Direktur Utama
2	Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	Direktur Pemasaran
3	Drs. Cahya Widi, M.M.	Direktur Umum
4	Drs. Santoso Rohmad, M.M.	Direktur Kepatuhan

Susunan Direksi yang bertugas selama periode Januari – Desember 2014 berwenang dan bertindak atas dasar dokumen pengangkatan yang telah diputuskan dan disahkan oleh oleh Pemegang Saham. Dokumen pengangkatan tersebut adalah sebagai berikut :

Dokumen Pengangkatan
Direksi PT. Bank BPD DIY Januari - Desember 2014

No.	Nama	Jabatan	Periode	Dokumen
1	Dr. Supriyatno, M.B.A.	Direktur Utama	2012 – 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur No. 344/KEP/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan Saudara Dr. Supriyatno, MBA Sebagai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012 – 2016. - Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2, tanggal 5 April 2013.
2	Drs. Bambang Setyo Pranoto	Direktur Pemasaran	2012 – 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Gubernur No. 231/KEP/2012 tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran, Direktur Umum, dan Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013 – 2017. - Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2, tanggal 5 April 2013.
3	Drs. Wahib Susanto, M.M.	Direktur Kepatuhan	2012 – 2016	
4	Priyono, S.E.	Direktur Umum	2012 – 2016	
5	Priyono, S.E.	Plt. Direktur Utama	2014 – 2016	Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 6, tanggal 23 April 2014.
6	Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.	Direktur Utama	2014 – 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tanggal 8 September 2014. - Akta Addendum Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah DIY, Nomor 6 tanggal 12 September 2014
7	Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	Direktur Pemasaran	2014 – 2018	
8	Drs. Cahya Widi, M.M.	Direktur Umum	2014 – 2018	
9	Drs. Santoso Rohmad, M.M.	Direktur Kepatuhan	2014 – 2018	

b. Tugas dan wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3 Tanggal 13 September 2013, yaitu antara lain :

1) Tugas Direksi :

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Bank.
- b. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Bank.
- c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bank, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Bank dan menyampaikannya kepada Komisaris.
- d. Membuat dan memelihara risalah rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi Bank dengan kelaziman yang berlaku bagi Bank.
- e. Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- f. Memberikan pertanggungjawaban serta segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank, berupa laporan kegiatan Bank, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut tata cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS.
- g. Menetapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
- h. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar atau berdasarkan petunjuk RUPS.

- i. Mengajukan kepada Dewan Komisaris usulan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku berikutnya.
 - j. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - k. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - l. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 2) Hak dan wewenang Direksi:
- a) Menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur dalam pengurusan Bank.
 - b) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
 - e) Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.
 - f) Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang telah ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan menjalankan tugas-tugasnya, Direksi telah membentuk, antara lain:

- 1) SPI (Satuan Pengawasan Intern)
- 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
- 3) UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah)
- 4) Komite Manajemen Kepegawaian
- 5) Komite Pengarah Teknologi Informasi
- 6) Komite Kebijakan Kredit
- 7) ALCO (*Asset Liability Committee*)
- 8) Komite Kepatuhan

c. Kriteria anggota Direksi:

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tanggal 5 April 2013, dan telah dinyatakan lulus dalam *Fit and Proper Test* serta mendapat persetujuan RUPS.

d. Rapat Direksi

Setiap kebijakan dan keputusan strategis Bank diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* yang terjadi. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal terjadi perbedaan. Setiap keputusan rapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib yang berlaku.

Selama tahun 2014, Direksi telah melaksanakan sebanyak 36 rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut :

Frekuensi Rapat Direksi PT. Bank BPD DIY Tahun 2014				
No.	Anggota Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Dr. Supriyatno, M.B.A.	8	8	100%
2	Drs. Bambang Setyo Pranoto	14	12	86%
3	Drs. Wahib Susanto, M.M.	14	14	100%
4	Priyono, S.E.	14	14	100%
5	Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.	22	22	100%
6	Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	22	17	77%
7	Drs. Cahya Widi, M.M.	22	20	91%
8	Drs. Santoso Rohmad, M.M.	22	20	91%

Materi rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tanggal	Materi Rapat Direksi
07 Januari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan status kantor Kas menjadi Cabang Pembantu. 2. Pemasalahan perkasan di kantor Cabang.
21 Januari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat kerja dengan semua cabang terkait rencana kerja 2014. 2. Tindak lanjut RUPSLB.
22 Januari 2014	Tindak lanjut RUPSLB.
25 Februari 2014	Inventarisasi dan solusi masalah mendesak dan/atau tertunda.
04 Maret 2014	Inventarisasi prioritas penyelesaian masalah, ke-SDM-an tindak lanjut rapat KMK.
12 Maret 2014	Kelanjutan penanganan kredit bermasalah, inventarisasi dan solusi masalah mendesak dan/atau tertunda.
21 Maret 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian jabatan Pemimpin Cabang Pembantu. 2. Wawancara untuk pengisian jabatan Pemimpin Bagian Administrasi Kredit. 3. Pencairan tabungan beku Direksi. 4. Jadwal rapat untuk membahas pengisian jabatan Pemimpin Cabang Wates. 5. Kepesertaan Direktur Utama sebagai peserta Dana Pensiun. 6. Asuransi penghargaan dan Tunjangan Hari Tua.

	7. Pembagian Jasa Produksi dan Dana Kesejahteraan.
28 Maret 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian jabatan Pemimpin Cabang Wates. 2. Promosi jabatan Pemimpin Bagian Administrasi Kredit Divisi Perkreditan, Pemimpin Cabang Pembantu dan Penyelia Pemasaran Bisnis.
17 April 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Komite Kepegawaian. 2. Hasil presentasi dan wawancara Calon Pejabat.
09 Mei 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji Ulang. 2. Perekrutan tenaga kerja Divisi TI. 3. Penyesuaian hak dan fasilitas Pemimpin Kelompok Operasional dan Pemimpin Kelompok <i>Quality Assurance</i> TI.
10 Juni 2014	Penggantian Penyelia Pelayanan Cabang Bantul.
02 Juli 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas surat Pemimpin SPI tentang MBT. 2. Penggantian Sekretaris Dewan Pengawas Dana Pensiun. 3. Persiapan PORSENI BPDSI 2015.
08 Agustus 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang perkreditan (promosi Kredit Swaguna dan Purnakarya). 2. Bidang Ke-SDM-an (menindaklanjuti kebijakan pemerintah berkaitan dengan BPJS).
04 September 2014	Persiapan pelantikan Direksi PT. Bank BPD DIY.
15 September 2014	Penunjukan PgS. Pemimpin Divisi Trisuri dan PgS .Pemimpin Divisi SDM dan Umum.
15 September 2014	Rapat koordinasi Direksi, Pemimpin Divisi / Pemimpin UUS, seluruh Pemimpin Cabang PT.Bank BPD DIY.
16 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Road show</i>/kunjungan dinas ke Pemegang Saham, Kantor Cabang dan Nasabah Besar. 2. <i>Corporate Identity</i>. 3. KUD / RBB / RKAT 2015. 4. Surat pemberitahuan ke cabang terkait permintaan uang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 5. Pengaturan renumerasi pengurus bank.

17 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi SPI. 2. Realisasi Audit Plan 2014. 3. SWOT.
18 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Organisasi. 2. Kinerja Perencanaan 2014. 3. Profil Analisis Divisi Perencanaan.
19 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan masalah kebakaran Pasar Klithikan dan dampaknya pada nasabah PT. Bank BPD DIY. 2. Kewenangan memutus kredit di tingkat Direksi.
23 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>BPD Regional Champion Bank.</i> 2. Pengembangan organisasi. 3. KUD / RBB tahun 2015. 4. HUT PT. Bank BPD DIY. 5. Porseni BPD SI tahun 2015.
30 September 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses bisnis Divisi Perkreditan 2015. 2. Urgensi pengadaan server TI. 3. <i>Launching new corporate identity.</i> 4. Penetapan pengisian jabatan Pemimpin Divisi dan pejabat struktural lainnya. 5. Perumusan Tata Tertib Direksi. 6. Profil Risiko Bank posisi September 2014.
07 Oktober 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana perjalanan dinas Direksi. 2. Pemenuhan LHKPN. 3. Evaluasi kerjasama / kemitraan dengan pihak ketiga. 4. Urgensi pengadaan server - lanjutan. 5. Pembahasan temuan Internal Audit bidang TI. 6. Kinerja Usaha Bank posisi 30 September 2014. 7. <i>Pipeline prospective loan and funding</i> kuartal IV 2014.
13 Oktober 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Usaha Bank posisi 30 September 2014. 2. Pemenuhan LHKPN. 3. Evaluasi kerjasama / kemitraan dengan pihak ketiga. 4. Format persetujuan kredit.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Persiapan <i>prudential meeting</i> dengan OJK tentang RBBR, GCG, suku bunga DPK dan kredit. 6. Persiapan implementasi teknologi kartu chip advance.
20 Oktober 2014	HUT PT. Bank BPD DIY ke 53.
21 Oktober 2014	Tindak lanjut hasil rapat komite SDM dan beberapa hal berkaitan dengan SDM.
22 Oktober 2014	Persiapan rapat ALCO Triwulan III tahun 2014 dan review ketentuan pelaksanaan rapat ALCO.
23 Oktober 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan logo PT. Bank BPD DIY. 2. Visi misi dan budaya kerja. 3. Peringatan HUT dan Jogja Investment Forum.
28 Oktober 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan perkreditan. 2. Kewenangan memutus kredit. 3. Kinerja perkreditan sampai dengan September 2014.
28 Oktober 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan perkreditan. 2. Kewenangan memutus kredit. 3. Pemantauan kredit dengan eksposur besar. 4. Kinerja perkreditan sampai dengan September 2014.
29 Oktober 2014	Implementasi kartu chip.
04 November 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut DBJ <i>project</i>. 2. Kerjasama dengan PLN. 3. Kerjasama remittance dengan BNI. 4. Undangan KAGAMA.
20 November 2014	Menindak lanjuti POJK baru bulan November 2014, khususnya penyelenggaraan <i>branchless banking</i> , <i>internet banking</i> , dan kualitas pembiayaan syariah.
27 November 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Likuiditas akhir tahun termasuk syariah. 2. Kolektibilitas akhir tahun. 3. Proyeksi laporan keuangan 31 Desember 2014. 4. Gambaran umum kinerja 2014. 5. Persiapan operasional akhir tahun.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penanganan kredit kolektibilitas 2 dan NPL. 7. Operasional penerimaan pajak. 8. Transaksi MPN dan SP2D.
15 Desember 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>BPD Regional Champion</i> (BRC) II. 2. <i>Rebranding</i>. 3. Visi misi dan budaya kerja. 4. <i>Corporate plan</i>.
24 Desember 2014	Rencana promosi dan rotasi pejabat.

Kegiatan Pelatihan/ Seminar Direksi tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jenis Pelatihan/Seminar
1	Dr. Supriyatno, M.B.A. (Direktur Utama)	Workshop sosialisasi Go Public
2	Drs. Bambang Setyo Pranoto (Direktur Pemasaran)	Seminar BPD SI dengan tema penerapan GCG sebagai Landasan untuk mewujudkan BPD <i>Regional Champion</i>
3	Drs. Wahib Susanto, M.M. (Direktur Kepatuhan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar BPD SI dengan tema penerapan GCG sebagai Landasan untuk mewujudkan BPD <i>Regional Champion</i> 2. Seminar Pemeliharaan Manajemen Risiko dengan topik Implementasi Basel III di Indonesia 3. Pelatihan SMR Level 5 BSMR 4. Sosialisasi Peraturan BI No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial 5. Seminar FKDKP Level Pengurus Bank
4	Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M. (Direktur Pemasaran)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop Internasional Program KUR 2. Seminar BPDSI dan Undian Tabungan Simpeda.
5	Drs. Santoso Rohmad, M. M. (Direktur Kepatuhan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan angkatan ke 4 tahun 2014 FKDKP. 2. Lokakarya Manajemen Risiko Bencana dan Asuransi Portofolio Bank. 3. Seminar Nasional Keuangan Berkelanjutan

E. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite dan Satuan Kerja yang menjalankan Fungsi Pengendalian Intern Bank

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Penjelasan tentang komite-komite tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komite Audit

a. Struktur dan Keanggotaan

Komite Audit PT. Bank BPD DIY diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota Independen. Pada tahun 2014 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Audit yaitu :

Komite Audit PT. Bank BPD DIY Periode Januari – Desember 2014		
No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	Ketua/Dewan Komisaris Independen
2	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Anggota/Dewan Komisaris
3	Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	Anggota/Pihak Independen
4	Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	Anggota/Pihak Independen

Dari komposisi tersebut di atas, mengindikasikan bahwa paling sedikit 51% anggota Komite Audit terdiri dari Dewan Komisaris Independen dan Pihak Independen.

b. Keahlian dan independensi:

- 1) Komite Audit terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang Akuntansi dan Keuangan;
- 2) Anggota Komite Audit yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Ekonomi;

- 3) Anggota Komite Audit merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko.

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

- 1) Melakukan penelaahan kecukupan kebijakan di bidang audit intern;
- 2) Menelaah dan mengevaluasi Laporan Keuangan Publikasi;
- 3) Menelaah laporan hasil audit intern maupun ekstern serta memantau tindak lanjutnya;
- 4) Membuat rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris;
- 5) Membuat pedoman kerja Komite.

d. Frekuensi Rapat

Rapat Komite Audit minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2014 Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat Komite Audit PT. Bank BPD DIY Tahun 2014				
No.	Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	4	4	100%
2	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	4	4	100%
3	Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	4	4	100%
4	Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	4	4	100%

e. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program Kerja Komite Audit PT. Bank BPD DIY Tahun 2014		
No.	Program Kerja	Realisasi
1	Mengkaji Program Kerja	Review terhadap Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)

	Audit Tahunan	Tahun 2014 yang dibuat oleh SPI.
2	Membahas temuan audit intern/ekstern	Pembahasan Laporan Hasil Audit: a. Kantor Akuntan Publik b. Bank Indonesia
3	Pertemuan dengan Satuan Pengawas Intern	Penjelasan Tugas Komite Audit dan hubungannya dengan Satuan Pengawas Intern. Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2014
4	Membahas temuan-temuan SPI	Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA): a. Semester I tahun 2014 terdiri atas 9 (sembilan) Laporan Hasil Audit (LHA) yang terdiri atas: 2 (dua) pemeriksaan khusus, 1 (satu) pemeriksaan bidang CSR, 1 (satu) pemeriksaan bidang Kredit Usaha Rakyat, 1 (satu) pemeriksaan bidang Kredit dan Pembiayaan, 1 (satu) pemeriksaan bidang Manajemen, 1 (satu) pemeriksaan bidang Operasional Cabang, 1 (satu) pemeriksaan bidang SKNBI, dan 1 (satu) pemeriksaan bidang RTGS. b. Semester II tahun 2014 terdiri atas 6 (enam) Laporan Hasil Audit (LHA) yang terdiri atas: 1 (satu) pemeriksaan bidang Kredit Usaha Rakyat, 1 (satu) pemeriksaan Manajemen, 1 (satu) pemeriksaan bidang Teknologi Informasi, 1 (satu) pemeriksaan Sektor Perhotelan, 1 (satu) pemeriksaan bidang Operasional Cabang, dan 1 (satu) pemeriksaan bidang Kredit.
5	Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank BPD DIY Tahun 2014
6	Melakukan review Metodologi audit oleh Auditor independen	Persiapan Audit yang akan dilaksanakan oleh auditor independen tahun 2014.
7	Melakukan review atas laporan publikasi	Review Laporan Publikasi Triwulan I dan Triwulan II 2014.
8	Melakukan rapat komite	Melakukan rapat komite sebanyak 4 kali dengan materi: a. Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan. b. Laporan Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2014. c. Laporan Pelaksanaan Hasil Audit Intern Tahun 2014. d. Pembahasan bersama SPI terkait rencana Audit tahun

2. Komite Pemantau Risiko

a. Struktur dan Keanggotaan

Komite Pemantau Risiko PT. Bank BPD DIY diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota. Pada tahun 2014 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko yaitu :

Komite Pemantau Risiko PT. Bank BPD DIY Periode Januari – Desember 2014		
No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Ainun Na'im Ph.D.	Ketua/Dewan Komisaris Independen
2	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Anggota/Dewan Komisaris
3	Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	Anggota/Pihak Independen
4	Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	Anggota/Pihak Independen

b. Keahlian dan independensi

Komite Pemantau Risiko terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang Ekonomi dan Keuangan:

- 1) Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko;
- 2) Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Akuntansi.

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

- 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang mencakup:
 - a) Pelaksanaan Pengawasan Aktif;
 - b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;

- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, meliputi 8 risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.
 - d) Sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh.
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
 - 3) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut dalam rangka perbaikan kepada Direksi;
 - 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya;
 - 5) Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan/budaya kerja yang berorientasi risiko (*risk culture*);
 - 6) Membuat pedoman kerja Komite.

d. Frekuensi Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2014, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko PT. Bank BPD DIY Tahun 2014				
No.	Anggota Komite	Jumlah Rapat	Juml. Kehadiran	% Kehadiran
1.	Prof. Ainun Na'im Ph.D.	4	4	100%
2.	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	4	4	100%
3.	Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A.	4	4	100%

4.	Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt.	4	4	100%
----	------------------------------	---	---	------

e. Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko PT. Bank BPD DIY Tahun 2014		
No.	Program Kerja	Realisasi
1	Mereview Program Kerja Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Review program kerja Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan
2	Membahas dan mereview pedoman-pedoman bidang Manajemen Risiko	Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
3	Menelaah profil risiko	Pencermatan atas laporan profil risiko oleh Bank serta laporan Peran Direktur Kepatuhan.
4	Melakukan Rapat Komite	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan hasil penilaian <i>self assessment</i> Profil Risiko Triwulan I Tahun 2014 b. Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013. c. Pembahasan hasil penilaian <i>self assessment</i> Profil Risiko Triwulan II Tahun 2014. d. Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2014. e. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2014. f. Pembahasan hasil penilaian <i>self assessment</i> Profil Risiko Triwulan III Tahun 2014. g. Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Triwulan III tahun 2014.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Struktur dan Keanggotaan

Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 2 (dua) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif. Pada tahun 2014 terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yaitu pada Anggota/Pejabat Eksekutif dengan susunan sebagai berikut :

**Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY
Periode Januari – Desember 2014**

No.	Nama	Periode	Jabatan
1	Prof. Ainun Na'im, Ph.D.	Jan – Des 2014	Ketua/Dewan Komisaris Independen
2	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	Jan – Des 2014	Anggota/Dewan Komisaris Independen
3	Drs. Cahya Widi, M.M.	Jan – Feb 2014	Anggota/Pejabat Eksekutif
4	Drs. Erna Wukiratun, M.M.	Feb – Des 2014	Anggota/Pejabat Eksekutif

b. Keahlian dan independensi

- 1) Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar belakang di bidang ekonomi, keuangan dan akuntansi;
- 2) Anggota Komite yang berasal dari PT. Bank BPD DIY adalah Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum yang memahami ketentuan-ketentuan remunerasi dan nominasi.

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Membuat pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- 4) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Prestasi kinerja individual;
 - c) Kewajaran dengan *peer group*;
 - d) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

- 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 6) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

d. Frekuensi Rapat

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2014 telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY Tahun 2014				
No.	Anggota Komite	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Prof. Ainun Na'im Ph.D	4	4	100%
2.	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	4	4	100%
3.	Drs. Cahya Widi, M.M.	2	2	100%
4.	Dra. Erna Wukiratun, M.M.	2	1	50%

e. Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY Tahun 2014		
No.	Program Kerja	Realisasi
1	Menelaah dan mereview kebijakan remunerasi Bank	Hasil pembahasan kebijakan remunerasi akan disampaikan dalam RUPS tahun 2015.
2	Menyusun kebijakan nominasi Bank	Kebijakan nominasi Direksi Periode 2014 - 2017
3	Melaksanakan rapat komite	1. Pembahasan proses seleksi Direksi. 2. Pembahasan proses seleksi Direksi. 3. Menetapkan Calon Direksi PT Bank BPD

		DIY yang akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris. 4. Pembahasan Hasil Wawancara
--	--	---

F. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Mengacu pada PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Direktur Kepatuhan memiliki kedudukan independen dalam tugasnya untuk memantau dan memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank demi terciptanya sistem perbankan yang sehat.

Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya secara umum selalu mengingatkan semua jajaran baik dari level tertinggi sampai pada petugas pelaksana, untuk selalu mematuhi ketentuan kehati-hatian, baik melalui pertemuan maupun sosialisasi dengan Pemimpin Divisi/SPI, Pemimpin Cabang maupun Pegawai. Dalam pertemuan maupun sosialisasi tersebut juga dikomunikasikan kebijakan-kebijakan yang akan maupun telah diambil oleh Direksi di dalam operasional Bank.

Dalam rangka memperlancar jalannya fungsi kepatuhan, telah ditetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan, yaitu dengan melakukan langkah-langkah pemantauan terhadap :

- a. Keputusan melalui Rapat Komite
- b. Keputusan tanpa melalui Rapat Komite
- c. Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan operasional Bank dan operasional Syariah
- d. Tugas Satuan Pengawas Intern
- e. Perjanjian dan Komitmen Bank dan Unit Usaha Syariah dengan Bank Indonesia
- f. Kepatuhan pelaporan ke Bank Indonesia

Direktur Kepatuhan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai perhitungan atau analisis CAR, GWM, NPL, KAP, BMPK, CKPN dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian Direktur Kepatuhan, seperti yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian, adalah sebagai berikut :

Items	Status	Keterangan
CAR	Memenuhi ketentuan	CAR pada posisi 31 Desember 2014, sebesar 16,23% melebihi persyaratan yang ditentukan BI.
GWM	Memenuhi ketentuan	Posisi 31 Desember 2014, GWM Primer dan Sekunder sebesar 8,25%, melebihi persyaratan BI sebesar 4%, dan GWM LDR telah sesuai ketentuan BI.
NPL	Memenuhi ketentuan	NPL Gross per 31 Desember 2014 adalah sebesar 1,23 %, dan NPL Neto sebesar 0,67 % Lebih rendah dibandingkan ketentuan Bank Indonesia yaitu NPL maksimum 5%.
PDN	Memenuhi ketentuan	PDN per 31 Desember 2014 sebesar 0%, dibandingkan dengan peraturan BI maksimum sebesar 20% dari ekuitas.
BMPK	Memenuhi ketentuan	BMPK pada posisi 31 Desember 2014 sebesar 0,83%, lebih rendah daripada persyaratan BMPK pada ketentuan Bank Indonesia sebesar 10%.
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Memenuhi ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Bank BPD DIY telah memenuhi sepenuhnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program APU & PPT. - PT. Bank BPD DIY secara rutin mengadakan pelatihan dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan untuk melakukan pencegahan dan pengenalan terhadap upaya pencucian uang.

2. Penerapan Prinsip APU dan PPT

Semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi mengakibatkan bank menjadi rentan atas risiko dimanfaatkan dalam usaha pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peningkatan risiko tersebut harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yaitu dengan menetapkan dalam suatu buku pedoman bagi perusahaan mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam menjalankan program tersebut Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dibantu oleh UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Unit ini bertanggung jawab selain mengkoordinasikan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang juga program prinsip mengenal nasabah yang dikenal dengan sebutan APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Pada tahun 2014, Bank telah mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan berkaitan dengan penerapan APU & PPT, yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Pelatihan	Keterangan	
			Peserta	Instruktur
1.	18 Januari 2014	Pelatihan APU / PPT	33 orang	PPATK
2.	16 - 17 Juni 2014	Pelatihan Penerapan APU / PPT	60 orang	PT. Bangun Integritas Persada

Dalam rangka penerapan *Single CIF*, secara rutin telah dilakukan review dan evaluasi terhadap posisi CIF, baik dalam satu kantor cabang maupun CIF antar kantor cabang. Sedangkan dalam upaya untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dalam kaitannya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bagian Kepatuhan senantiasa melakukan *monitoring* transaksi nasabah. Dari hasil *monitoring* nasabah tersebut diperoleh laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang disampaikan kepada PPATK. Pencegahan tersebut menjadi upaya Bank dalam menghadapi berbagai risiko terutama risiko reputasi, risiko hukum dan risiko operasional.

Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bank telah menerapkan kebijakan :

- a. Pengawasan Manajemen dalam kebijakan pengorganisasian
- b. Kebijakan CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*)
- c. Pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*)
- d. Prosedur penerimaan, identifikasi dan verifikasi
- e. Penetapan kriteria dan prosedur area berisiko tinggi dan PEP (*Politically Exposed Person*)
- f. Prosedur transfer dana
- g. Pemantauan dan pengkinian data nasabah
- h. Sistem Informasi dan Pelaporan
- i. CTR (*Cash Transaction Report*) dan STR (*Suspicious Transaction Report*)
- j. Pelatihan pegawai dan penatausahaan dokumen
- k. Sanksi atas pelanggaran ketentuan APU & PPT dan ketentuan perundang-undangan

3. Penerapan Fungsi Audit Intern

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, PT. Bank BPD DIY telah membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Kontrol Intern Cabang (KIC) yang masing-masing independen terhadap satuan kerja operasional. SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sedangkan KIC bertanggung jawab langsung kepada SPI.

Fungsi SPI meliputi :

- a. Sebagai *Evaluator* Sistem Pengendalian Intern, yaitu membantu manajemen dalam memastikan bahwa Bank secara berkesinambungan mampu :
 - 1) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
 - 2) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
 - 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan

- 4) Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian
 - 5) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya
 - 6) Mengamankan dana yang dihimpun Bank dari masyarakat
 - 7) Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh
- b. Sebagai Katalisator, internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa proses bisnis yang dijalankan telah menghasilkan jasa perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam peran ini, internal auditor bertindak sebagai fasilitator dan *agent of change*.
 - c. Sebagai Konsultan bagi pihak-pihak intern Bank yang membutuhkan terutama yang menyangkut sistem pengendalian.

Fungsi KIC, antara lain adalah:

- a. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan prosedur operasional perbankan di kantor cabang
- b. Melakukan pengawasan proses kegiatan usaha kantor cabang
- c. Melakukan koordinasi penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang
- d. Melakukan koordinasi perbaikan/penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal

Sepanjang tahun 2014, PT. Bank BPD DIY telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memberikan pengaruh bagi kepentingan Bank dan masyarakat melalui audit berbasis risiko. Sehingga dengan demikian, PT. Bank BPD DIY dapat terhindar dari risiko yang akan terjadi dan nasabah akan mendapatkan ketenangan dalam melakukan transaksi dengan Bank.

PT. Bank BPD DIY telah menerapkan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan :

- a. Menyusun *Internal Audit Charter*.
- b. Membentuk Satuan Pengawasan Intern sebagaimana tertuang dalam susunan organisasi dan tata kerja.

Ruang lingkup Pengendalian Intern Bank :

Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap :

- a. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern;
- b. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern;
- c. Penilaian kualitas kinerja;

Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam setiap laporan hasil audit.

Kinerja SPI pada tahun 2014 adalah:

- a. Audit Intern, meliputi :

No	Nama Obyek Audit	Sasaran Auditee	Kriteria
1	Audit khusus selisih kurang Kantor Kas	Kantor Cabang Sleman	<i>Internal fraud</i>
2	<i>Corporate Social Responsibility</i>	Kantor Pusat	SK Direksi Nomor 0197/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> , SK Direksi Nomor 00198/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Standar Operasional Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
3	Kredit Usaha Rakyat	Seluruh Cabang Konvensional	Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. No : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal

25 Januari 2010			
4	Perkreditan dan Pembiayaan	Seluruh Cabang	
5	Penerapan Manajemen Risiko Penerapan TI	Kantor Pusat & UUS	SE BI Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007
6	Operasional Cabang	Seluruh Cabang	Audit Operasional Cabang, Program Kerja Audit Tahunan SPI
7	SKNBI	Seluruh Cabang	
8	BI RTGS Konvensional dan Syariah	Kantor Pusat & Cabang Syariah	SE BI Nomor 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 dan Surat BI Nomor 14/563/DASP tanggal 14 Agustus 2012
9	Audit Khusus Kredit Kelolaan	Kantor Cabang Bantul	<i>Internal Fraud</i>
10	Kredit Usaha Rakyat	Seluruh Cabang Konvensional	Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. No : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010
11	Manajemen	Kantor Pusat	Audit aktifitas divisi, Program Kerja Audit Tahunan SPI
12	Penerapan Manajemen Risiko Penerapan TI	Divisi Teknologi Informasi	SE BI Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007
13	Debitur sektor perhotelan	Seluruh Cabang	
14	Operasional Cabang	Seluruh Cabang	Audit Operasional Cabang, Program Kerja Audit Tahunan SPI
15	Perkreditan dan pembiayaan	Seluruh Cabang	Audit Kelengkapan Syarat Pencairan dan Penarikan Kredit 10 Debitur Terbesar

b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi para auditor, melalui koordinasi dengan Divisi SDM dan Umum, dalam tahun 2014 seluruh auditor telah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan pelatihan serta beberapa seminar.

Data pelatihan dan seminar yang diikuti :

No	Tanggal	Pelatihan	Instruktur
1	28 - 30 Januari 2014	Pelatihan <i>Risk Based IT Audit Training & Workshop</i>	PT. Adikarya Tata Informasi
2	10 - 19 Februari 2014	Pelatihan Komunikasi dan Psikologi Audit	PPAK
3	13 - 19 Februari 2014	Pelatihan Audit Kecurangan	PPAK
4	28 - 29 Maret 2014	Pelatihan Internal Audit Syariah	Muamalat Institute
5	29 - 30 April 2014	<i>Workshop Investigative Interview Skills</i>	ACFE
6	05 - 14 Mei 2014	Pelatihan Audit Operasional	PPAK
7	21 - 22 Mei 2014	Pelatihan kewaspadaan dan Tantangan Bank di Tahun 2014 oleh FKDKP	FKDKP
8	11 - 13 Juni 2014	Pelatihan <i>Improving Competency for Auditing Trading, Manufacture & Construction</i>	Asbanda
9	16 - 18 Juni 2014	Pelatihan <i>Information Technology Auditing, Function & Implementing</i>	Asbanda
10	18 - 28 Agustus 2014	Pelatihan Pengelolaan Tugas-tugas Audit	PPAK
11	21 - 27 Agustus 2014	Pelatihan Audit Kecurangan	PPAK
12	21 - 26 Agustus 2014	Pelatihan Audit Sampling	PPAK
13	27 - 28 Agustus 2014	Pelatihan Kewaspadaan serta Tantangan Bank di Bidang Pengawasan dan Pengendalian	FKDKP
14	28 - 29 Agustus 2014	<i>Whistleblowing System</i>	Golden Bridge Institute

15	09 - 11 September 2014	Pelatihan <i>Basic Treasury for Internal Auditor</i>	Asbanda
16	18 - 19 September 2014	Seminar dan Mukernas FKSPI 2014	FKSPI
17	22 Oktober 2014	Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan	OJK
18	13 - 14 Desember 2014	Diklat BUKP DIY tahun 2014 Angkatan I	BUKP DIY
19	20 - 21 Desember 2014	Diklat BUKP DIY tahun 2015 Angkatan II	BUKP DIY

c. Pembinaan Bidang dan Kegiatan lain SPI :

- 1) Sebagai *counterpart* auditor ekstern
- 2) Berperan sebagai mitra/mediator berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Bank
- 3) Pembinaan kepada *auditee* yang berkaitan dengan materi hasil audit
- 4) Mengadakan koordinasi dengan Tim Pembina BUKP Propinsi DIY

d. Laporan yang disusun pada tahun 2014, adalah:

- 1) Laporan Kinerja Satuan Pengawasan Intern Tahun 2014
- 2) Laporan Pokok-Pokok dan Hasil Audit Intern Semester I dan II tahun 2014 yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan juga kepada Direksi

e. Kegiatan audit pasif (*off-site*)

Selain melaksanakan Audit secara aktif, juga melaksanakan kegiatan Audit pasif (*off-site*), antara lain :

- 1) Mencermati dan mengevaluasi hasil analisis rasio-rasio keuangan
- 2) Memantau penyelesaian Laporan Pengaduan Nasabah
- 3) Memantau dan mengkaji tindak lanjut hasil audit, baik intern maupun ekstern

f. Pembinaan BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan)

Sepanjang tahun 2014, PT. Bank BPD DIY sebagai salah satu Pembina BUKP telah

melakukan pembinaan terhadap 75 unit BUKP yang terdapat di wilayah DIY.

4. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan dari salah satu hasil rekomendasi Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Bank menindaklanjuti mengadakan perjanjian dengan Kantor Akuntan Publik. PT. Bank BPD DIY juga menunjuk Auditor Eksternal untuk melakukan Audit Manajemen pada tahun 2014. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut. Penunjukan KAP tersebut juga telah disetujui dalam RUPS.

Penunjukan KAP tersebut didasarkan pada perjanjian kerja sama antara PT. Bank BPD DIY dengan KAP, dengan nomor perjanjian: 0199/KA 1006 // 12/ARY/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014, yang menyatakan bahwa KAP akan melaksanakan general audit terhadap Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. PT. Bank BPD DIY dalam penugasannya kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperhitungkan dan mewajibkan pemenuhan aspek-aspek mengenai :

- a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- b. Legalitas perjanjian kerja
- c. Ruang lingkup audit
- d. Standar profesional akuntan publik, dan
- e. Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik

Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya KAP diwajibkan berpedoman dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Melakukan audit harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara (SKPN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

b. KAP wajib menyampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia :

- Laporan Hasil Audit
- *Management Letter*
- Informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dari Akuntan Publik yang dilakukan setiap saat apabila diperlukan
- Memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank

c. KAP harus membicarakan terlebih dahulu Konsep Laporan Hasil Audit dengan Bank sebelum diterbitkan Laporan Final

d. KAP tidak diperkenankan melimpahkan/menyerahkan pelaksanaan tugas serta hasil audit kepada pihak lain tanpa persetujuan dan seizin Bank

Dalam rangka persiapan audit maupun dalam pelaksanaan audit, KAP telah mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia. Sebaliknya, Bank Indonesia juga dapat meminta informasi kepada Akuntan Publik meskipun perjanjian kerja antara Akuntan Publik dengan Bank telah berakhir.

Adapun Ruang Lingkup Audit adalah:

- 1) Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi:
 - a) Laporan Posisi Keuangan

- b) Laporan Laba Rugi Komprehensif
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas
 - d) Laporan Arus Kas, dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan
- 2) Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur pengendalian intern yang ditemukan selama audit dalam bentuk *Management Letter*.
 - 3) Menerbitkan Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
 - 4) Review atas Hasil Evaluasi Kinerja :
 - a) Realisasi dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2014
 - b) Tingkat Kesehatan Bank yang diukur berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 05 Januari 2011
 - c) Perkembangan Usaha
 - d) Rasio-rasio Keuangan
 - e) Tindak Lanjut Hasil Audit tahun yang lalu

G. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko yang efektif akan memberikan manfaat bagi Bank karena akan meningkatkan *stakeholder value* dan dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan risiko yang harus ditanggung Bank di masa mendatang. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, PT. Bank BPD DIY sebagai usaha yang memiliki kompleksitas tinggi, melakukan pengelolaan risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Penerapan manajemen risiko terhadap 8 (delapan) risiko tersebut meliputi :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko dilakukan melalui, antara lain evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Penilaian Profil Risiko, Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, serta Laporan Direktur Kepatuhan.
- b. Di samping pengawasan pasif (*off-site*), Direksi khususnya Direktur Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk melakukan sosialisasi manajemen risiko dengan tujuan memberikan pemahaman yang benar kepada pegawai dalam rangka meningkatkan *awareness* terhadap risiko yang melekat pada setiap individu dan aktivitas pekerjaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku dari setiap aktivitas yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- c. Selain hal tersebut diatas, manajemen telah melakukan sistem penerimaan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dari setiap unit kerja untuk pengelolaan risikonya.
- d. Sesuai dengan PBI Nomor: 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, PT. Bank BPD DIY telah mengikutsertakan pengurus dan pegawai dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan rincian sebagai berikut :

Program Sertifikasi Manajemen Risiko Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY sampai dengan Tahun 2014		
No.	Level	Jumlah
1	Program Eksekutif	1
2	Level 1	271
3	Level 2	59
4	Level 3	9
5	Level 4	31
Total		371

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

a. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang termuat dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP), antara lain :

- 1) BPP Manajemen Risiko Secara Umum
- 2) BPP Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan
- 3) BPP Manajemen Risiko Operasional
- 4) BPP Manajemen Risiko Pasar
- 5) BPP Manajemen Risiko Likuiditas
- 6) BPP Manajemen Risiko Hukum
- 7) BPP Manajemen Risiko Strategik
- 8) BPP Manajemen Risiko Reputasi
- 9) BPP Manajemen Risiko Kepatuhan
- 10) BPP Profil Risiko

Pada tahun 2014, untuk menyesuaikan pelaksanaan manajemen risiko, Bank telah melakukan review terhadap BPP Manajemen Risiko. Selain itu, sesuai dengan SE BI Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Bank juga melakukan penyempurnaan kebijakan terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance* melalui BPP Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

b. Dalam rangka mitigasi risiko dan menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank juga menetapkan limit pada tahun 2014, antara lain:

- 1) Kebijakan tentang kewenangan memutus kredit
- 2) Kebijakan tentang kewenangan penempatan dana
- 3) Kebijakan tentang pengeluaran biaya
- 4) Kebijakan tentang pengeluaran kas
- 5) Kebijakan tentang BMPK
- 6) Kebijakan tentang KPMM
- 7) Kebijakan tentang NPL

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
 - 1) Proses identifikasi risiko yang telah dilakukan Bank adalah dengan melakukan penyempurnaan parameter penilaian profil risiko sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan proses identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
 - 2) Bank secara rutin melakukan pengukuran risiko dengan menilai parameter-parameter yang ada dalam aktivitas bisnis Bank, antara lain dengan melakukan *stress testing* dan *back testing*.
 - 3) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga dan risiko likuiditas, Bank menerapkan *Asset and Liabilities Management (ALMA)* yang secara rutin dibahas dalam rapat ALCO.
 - 4) Bank melakukan evaluasi ORSA (*Operating Risk Self Assesment*) dan LED (*Loss Event Database*). Evaluasi dilakukan dengan mengkaji kembali relevansi *key risk indicator* dengan aktivitas operasional.

Hasil penilaian Risiko secara *self assessment* PT. Bank BPD DIY pada akhir tahun 2014 adalah pada Peringkat 2, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Risiko	Peringkat Risiko				
		Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate To High	High
1	Kredit					
2	Pasar					
3	Likuiditas					
4	Operasional					
5	Hukum					
6	Strategik					

7	Kepatuhan					
8	Reputasi					

4. Sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko, Bank telah:

- 1) Menetapkan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank
- 2) Menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah disusun oleh Bank
- 3) Menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional dan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian
- 4) Melakukan pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
- 5) Melakukan kaji ulang yang efektif dan obyektif terhadap kegiatan operasional baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang
- 6) Melakukan dokumentasi terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit
- 7) Melakukan verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

5. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Bank telah menyusun kebijakan Buku Pedoman Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0040/OM 1007 tanggal 30 Januari 2012. Pada tahun 2014, Bank telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) terhadap faktor-faktor dan hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Faktor Penilaian	Peringkat
1.	Profil Risiko	2
2.	<i>Good Corporate Governance</i>	2
3.	Rentabilitas	2
4.	Permodalan	1
Peringkat Komposit		2

Hasil yang diperoleh dalam penilaian *self assesment* terhadap 4 (empat) faktor tersebut, Bank mencapai Peringkat Komposit 2 (PK-2), dimana mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, PT. Bank BPD DIY telah membuat suatu kebijakan, sistem dan prosedur pemberian kredit besar dan pihak terkait sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.

PT. Bank BPD DIY telah mengatur dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang tertuang dalam kebijakan, sistem dan prosedur BMPK serta Kebijakan Pemberian Kredit sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara berkala kebijakan tersebut dievaluasi dan dilakukan pengkinian.

Selama tahun 2014 tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Berikut adalah penyediaan dana kepada Pihak Ketiga dan penyediaan dana besar:

Penyediaan Dana Kepada Pihak Ketiga dan Penyediaan Dana Besar

Tahun 2014			
No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	37	7.186
2	<u>Kepada Debitur Inti:</u> a. Individu b. Group	15	598.592
Catatan : Jumlah total Baki Debet penyediaan dana pihak terkait dan debitur inti baik perorangan maupun group per posisi laporan.			

Rencana Strategis Bank

1. Dasar Penyusunan

Rencana Strategis Bank disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*). Dalam menyusun perencanaan tersebut, Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/3/DPbS tanggal 18 November 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah. Penyusunan dilaksanakan secara spesifik, terukur, realistis, dan relevan serta tepat waktu.

2. Rencana Korporasi (*Corporate Plan*)

Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) merupakan suatu perencanaan manajemen selama 5 (lima) tahun yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan peran Bank sebagai agen pembangunan dan sebagai Bank Umum yang tetap menguntungkan dan berkembang. *Corporate Plan* tahun 2011 – 2015 disusun sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan sasaran, strategi, dan program kerja, serta agar PT. Bank BPD DIY dapat

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, dan dijabarkan setiap tahun dalam Business Plan.

Rencana Korporasi Bank periode 2011 – 2015 disusun berdasarkan data internal dan eksternal masa lalu, serta prediksi kondisi ekonomi, sosial, teknologi yang akan terjadi dan berpengaruh terhadap industri perbankan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Korporasi telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yang meliputi :

- a. Visi dan misi PT. Bank BPD DIY
- b. Kondisi ekonomi makro dan mikro nasional
- c. Kondisi ekonomi makro dan mikro regional
- d. Analisa SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threats*)
- e. Strategi dan target jangka panjang

3. Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*)

Rencana Bisnis Bank mencakup rencana jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) yang disusun dengan tetap memperhatikan perkembangan internal dan eksternal, azas perbankan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Rencana Bisnis Bank meliputi :

- a. Ringkasan eksekutif
 - Visi dan misi
 - Arah kebijakan
 - Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank
 - Indikator keuangan
 - Target jangka pendek dan menengah
- b. Kebijakan dan strategi manajemen
 - Analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha
 - Kebijakan manajemen
 - Kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan

- Strategi pengembangan bisnis
 - Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan remunerasi
- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini
- Penerapan manajemen risiko
 - Penerapan tata kelola yang baik
 - Kinerja keuangan, khususnya permodalan dan rentabilitas
 - Realisasi pemberian kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
 - Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah
- d. Sasaran-sasaran meliputi
- Proyeksi keuangan
 - Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu;
 - Rencana pendanaan
 - Rencana permodalan
 - Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM)
 - Rencana pengembangan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
 - Perubahan jaringan kantor
 - Informasi lainnya
4. Rencana Bisnis Bank Tahun 2014

Rencana Bisnis Bank Tahun 2014 telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Nomor 002/KPTS/DP/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. Rencana Bisnis Bank ini disusun dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perkembangan kondisi internal dan eksternal, serta azas perbankan yang sehat. Kebijakan Bank yang ditempuh dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2014 disesuaikan

dengan program BPD *Regional Champion* yang telah dicanangkan tanggal 21 Desember 2010. Untuk itu PT. Bank BPD DIY tetap berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasarnya yang harus didukung modal Bank yang kuat.

Sesuai visi dan misi PT. Bank BPD DIY, dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan regional DIY, maka jajaran manajemen PT. Bank BPD DIY memandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi antara lain :

a. Target Jangka Pendek

Kinerja Keuangan :

- Total aset sebesar Rp 9.700.000 juta
- Penyaluran kredit sebesar Rp 6.500.000 juta
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 8.255.997 juta
- Laba sebelum pajak sebesar Rp 232.000 juta

Mencapai rasio-rasio keuangan utama :

- CAR : 16,22%
- LDR : 78,11%
- BOPO : 73,35%
- ROA : 2,62%
- ROE : 20,46%
- NIM : 7,47%
- NPL Gross : 1,49%

Non Keuangan :

- Meningkatkan ragam jasa pelayanan dalam rangka peningkatan *fee base income* sebesar 10%.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sehingga mencapai Indeks Kepuasan Nasabah pada nilai 4 pada skala 5
- Meningkatkan jumlah nasabah dana sebanyak 10%
- Meningkatkan jumlah nasabah kredit sebanyak 10%

- Mengendalikan risiko konsentrasi kredit pada 15 debitur besar setinggi-tingginya 20% dari total kredit yang diberikan
- Meningkatkan jumlah pemegang kartu ATM sebanyak 15%
- Memastikan penerapan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)
- Memantapkan penerapan budaya risiko (*risk culture*)
- Penyempurnaan Organisasi Bank
- Memastikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
- Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- Pembukaan 1 (satu) Kantor Kas Konvensional, 1 (satu) Kantor Kas Syariah, penambahan 8 (delapan) ATM dan 9 (sembilan) jaringan layanan Syariah
- Relokasi 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu, 3 (tiga) Kantor Kas, 3 (tiga) ATM, dan 1 (satu) Payment Point
- Peningkatan Status 10 (sepuluh) Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu, dan 2 (dua) Payment Point menjadi Kantor Kas
- Pengembangan aktivitas dan pengembangan produk dan jasa layanan Mobile Banking, Remittance dan Bancassurance Referensi

b. Target Jangka Menengah

Dalam persiapan memasuki bisnis perbankan kategori Buku 2, Bank memiliki target jangka menengah diantaranya sebagai berikut:

- Mencapai modal inti minimal Rp. 1 Triliun
- Penjajakan Bank Devisa
- Pengembangan internet banking, dan pengembangan Laku Pandai (branchless banking).
- Pengembangan kegiatan treasury, diantaranya transaksi valas, DPK valas, dealer forex, letter of credit, cash management, dan reksadana.
- Meningkatkan penyaluran kredit produktif paling rendah 60% dari total kredit.
- Menyusun human capital strategic plan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu menghadapi persaingan bisnis yang lebih kompleks

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.

(dalam jutaan)

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY								
Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham Per 31 Desember 2014							
	Bank BPD DIY		Bank Lain		LKBB		Perusahaan Lainnya	
	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal
Prof. Ainun Na'im, Ph. D	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	35,000*)	110.901
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*)Keterangan : Qty. ADRO 10,000; BWPT 3,500; KRAS 1,000; SMCB 15,000; TLKM 5,500.

Kepemilikan Saham Direksi PT. Bank BPD DIY								
Direksi	Kepemilikan Saham Direksi Per 31 Desember 2013							
	Bank BPD DIY		Bank Lain		LKBB		Perusahaan Lainnya	
	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal	Lbr Saham	Nominal
Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Drs. Cahya Widi, M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Drs. Santoso Rohmad, M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Bank:

Keterkaitan Hubungan Keuangan dan Keluarga PT. Bank BPD DIY Tahun 2014			
No.	Keterkaitan	Hubungan Keluarga	Hubungan Keuangan
1	Dewan Komisari dan Direksi dengan Dewan Komisaris Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
2	Dewan Komisaris dan Direksi dengan Direksi Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
3	Dewan Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali	Tidak ada	Tidak ada

3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan)

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPD DIY Tahun 2014					
No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	1.719,74	4	16.768,64
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi Kesehatan dan sebagainya), yang: a. Dapat dimiliki	-	-	-	-

	b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
	Total	3	1.719,74	4	16.768,64

No.	Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
1	Di atas Rp 2 M	3	-
2	Di atas Rp 1 M s/d Rp 2 M	5	-
3	Di atas Rp 500 jt s/d Rp 1 M	-	3
4	Rp 500 jt ke bawah	-	-

4. *Share option*

Tidak terdapat *share option* yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif PT. Bank BPD DIY.

Share Option PT. Bank BPD DIY					
Posisi Desember 2014					
	Keterangan /Nama	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Dewan Komisaris	Prof. Ainun Na'im, Ph.D Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. Drs. Bambang Wisnu Handoyo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi	Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A. Bambang Kuncoro, S.H., M.M. Drs. Cahya Widi, M.M. Drs. Santoso Rohmad, M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif	Drs. Arief Yulianto, M.M. Dra. Kustianti, M.M. Ir. Widodo, M.M. Hangkoso, S.E., M.M. Drs. Widjayanto, M.M. Dra. Erna Wukiratun, M.M.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

	Gamal Kristiyanto,S.H., M.M. Drs. Muhammad Afnan,M.M. Drs. Kwartono Agus Rachmadi, M.Si. Yustina Oktaviani, S.E.,M.M. Ir. Nur Iswantoro, M.M. Agus Trimurjanto, S.E., M.M. Dian Ariani, S.E., M.M. Riani Ernastuti, S.E., M.M. Drs. Supriyanto, M.M.				
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2014		
No	Keterangan	Prosentase
1	Gaji Pegawai Tertinggi – Terendah	4,49
2	Gaji Direktur Tertinggi – Terendah	1,11
3	Gaji Dewan Komisaris Tertinggi – Terendah	1,11
4	Gaji Dewan Komisaris Syariah Tertinggi - Terendah	1,17
5	Gaji Direktur Tertinggi – Pegawai Tertinggi	2,34

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Adapun daftar kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat, sebagai berikut :

Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2014				
No.	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran

1	Prof. Ainun Na'im, Ph.D	7	6	86%
2	Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.	7	7	100%
3	Drs. Bambang Wisnu Handoyo	7	5	71%
4	Dr. Supriyatno, M.B.A.	2	2	100%
5	Drs. Bambang Setyo Pranoto	4	4	100%
6	Drs. Wahib Susanto, M.M.	4	3	75%
7	Priyono, S.E.	4	4	100%
8	Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.	3	3	100%
9	Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H. M.M.	3	3	100%
10	Drs. Santoso Rohmad, M.M.	3	3	100%
11	Drs. Cahya Widi, M.M.	3	3	100%

Agenda Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	11 Februari 2014	Tindaklanjut RUPSLB 17 Januari 2014
2	22 Maret 2014	Laporan Pertanggungjawaban Direksi & Dewan Komisaris
3	20 April 2014	1. Penunjukan Plt. Direktur Utama 2. Asuransi Jiwasraya
4	23 Mei 2014	Kinerja Triwulan I Th 2014
5	30 Agustus 2014	Rakor Dekom & Direksi
6	28 September 2014	1. Kebijakan Umum Direksi 2. Jogja Investment Forum 3. Remunerasi 4. Lain-lain
7	08 November 2014	1. Review Kinerja 2. Inisiatif Jogja Investment Forum 3. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang belum diungkap dalam Laporan Keuangan

1) Informasi dan laporan kondisi keuangan dan non keuangan

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non-keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah disempurnakan dengan PBI Nomor 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Semua transaksi kondisi keuangan dan non keuangan Bank telah dituangkan dalam:

- a) Laporan Tahunan
- b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- c) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
- d) Laporan Keuangan Konsolidasi
- e) Laporan Non Keuangan Bank

Informasi keuangan dan non keuangan disampaikan kepada publik melalui *homepage* : www.bpddiy.co.id dan media yang memadai;

2) Informasi produk dan jasa Bank

Informasi produk dan jasa Bank didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Adapun pelaksanaan promosi melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik dan lainnya.

Untuk layanan informasi dan promosi, melalui antara lain:

- a) Media elektronik : *website* , radio, dan televisi
- b) Media cetak : brosur, spanduk, *leaflet*, *billboard*, surat kabar dan majalah
- c) Media lainnya : pameran, kerja sama antar lembaga dan penayangan film

Setiap kantor pelayanan telah tersedia informasi produk dan jasa secara tertulis mengenai karakteristik produk Bank dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan warna tulisan yang kontras dengan warna latar pada lokasi yang mudah diakses oleh nasabah. Begitu pula apabila terdapat perubahan terhadap karakteristik produk Bank.

Salah satu prosedur transparansi informasi produk, Bank meminta tanda tangan nasabah pada lembar aplikasi pemanfaatan produk Bank yang antara lain menyatakan bahwa :

- a) Bank telah menjelaskan karakteristik produk Bank secara utuh; dan
- b) Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan mengenai karakteristik produk Bank yang diberikan

Dalam transparansi penggunaan data pribadi nasabah, Bank tidak dapat menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data. Persetujuan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tulisan dan/atau tanda tangan pada lembar permintaan persetujuan tertulis.

3) *Business Continuity Plan*

Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Ancaman terhadap kelangsungan bisnis

secara garis besar dapat disebabkan oleh faktor bencana alam (*natural disaster*), kerusakan teknis (*technical disaster*), atau perbuatan manusia (*human made disaster*). Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi namun juga berdampak pada kegiatan operasional bisnis Bank. Bank telah menyusun prosedur penanganan bencana yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a) Dokumen Strategi Pemulihan
 - b) Dokumen *Business Continuity Plan* (BCP) PT. Bank BPD DIY
 - c) Lampiran Dokumen BCP
 - d) Prosedur Respon Darurat
 - e) Prosedur Alternatif
- 4) Budaya Perusahaan, Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan
- Budaya Perusahaan PT. Bank BPD DIY adalah merupakan serangkaian anggapan, nilai dan norma sebagai hasil penggalian jati diri PT. Bank BPD DIY, yang diharapkan mampu membimbing dan memberi arah serta membangun perilaku pegawai yang dapat membawa PT. Bank BPD DIY ke arah keberhasilan usaha.
- Budaya Perusahaan yang dikelola dengan baik dan mendapat dukungan serta kesediaan dari setiap pegawai untuk melaksanakannya secara sadar, memiliki peranan yang strategis dalam upaya pencapaian misi, tujuan, strategi dan sasaran usaha Bank.
- Statement* Budaya Perusahaan PT. Bank BPD DIY adalah “Kita Berkembang Bersama”. Dari statemen tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) pilar Budaya Perusahaan PT. Bank BPD DIY.

Pilar-pilar Budaya Perusahaan, adalah:



Dari ketiga pilar tersebut dijabarkan kembali ke dalam 9 (sembilan) butir perilaku Pegawai PT. Bank BPD DIY.

Adapun 9 (sembilan) butir perilaku tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bekerja sebagai wujud beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Kepuasan nasabah sebagai acuan dalam bekerja
- c) Mengutamakan kemajuan Bank melalui profesionalisme
- d) Meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan dan perilaku
- e) Mengutamakan mutu hasil kerja yang tinggi
- f) Menciptakan mutu hubungan kerja sama antar pegawai
- g) Memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha yang harus dibina secara berkelanjutan
- h) Setiap pegawai berperan sebagai pemasar produk-produk
- i) Setiap pegawai wajib menjaga dan meningkatkan citra Bank

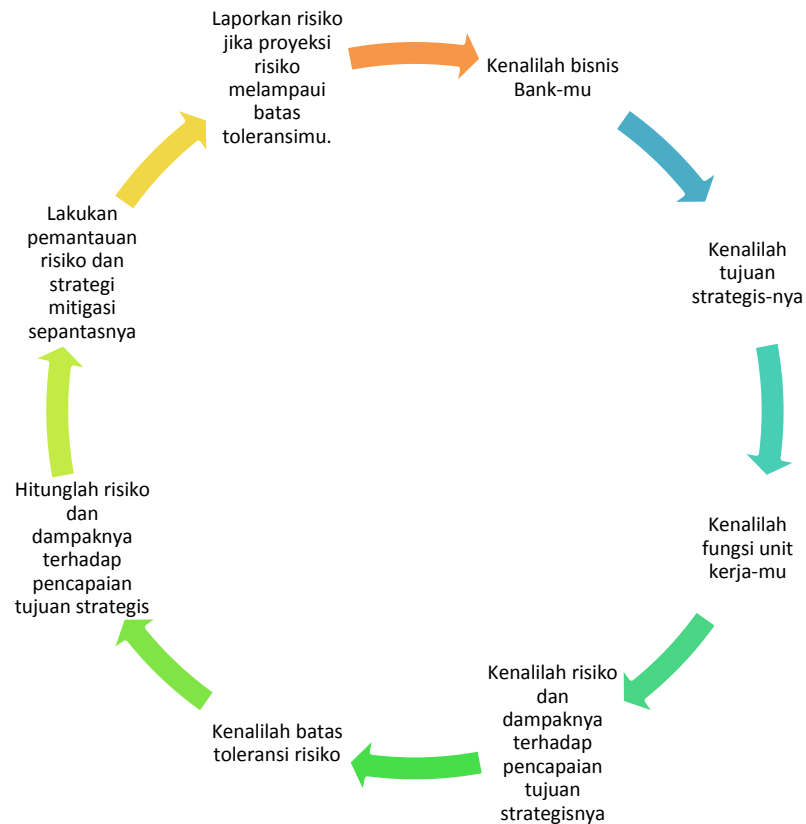
Budaya Perusahaan PT. Bank BPD DIY dapat berkembang dengan baik karena adanya beberapa hal sebagai berikut :

- a) Peran Jajaran Pimpinan
- b) Komitmen Manajemen yang kuat
- c) Keteladanan Pimpinan

Penerapan Budaya Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari penerapan Budaya Risiko. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum khususnya Pasal 7 tentang Kewenangan dan

Tanggung Jawab Direksi, huruf e menyatakan: kewajiban Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Sosialisasi pedoman pelaksanaan Budaya Risiko telah menjadi agenda setiap tahunan PT. Bank BPD DIY. Hal tersebut bertujuan agar setiap pengurus maupun pegawai Bank memahami dan selalu menyadari bahwa di setiap aktivitas atau kegiatan operasional maupun dalam setiap proses pengambilan keputusan bisnis yang dilakukannya, berpotensi menimbulkan risiko. Ruang lingkup Budaya Risiko adalah mencakup semua risiko yang ditanggung oleh Bank seperti halnya diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003.

Penerapan Budaya Risiko di PT. Bank BPD DIY didasarkan pada 8 (delapan) pilar budaya risiko Bank, sebagai berikut :



5) Jumlah Penyimpangan internal (*Internal Fraud*)

Jumlah penyimpangan internal yang terjadi selama tahun 2014 adalah :

INTERNAL FRAUD TAHUN 2014						
Jumlah kasus yang dilakukan oleh						
Internal Fraud dalam 1 tahun	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	1	-	1	-
Telah Diselesaikan	-	-	1	-	1	-
Dalam Proses Penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM Sampai Dengan Tahun 2014		
Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	5	-
Total	5	-

- 6) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
Sepanjang tahun 2014, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**BENTURAN KEPENTINGAN
PT. Bank BPD DIY
Tahun 2014**

No.	Nama dan Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

7) *Buy Back Shares* dan atau *Buy Back Obligasi* Bank

Selama tahun 2014, PT. Bank BPD DIY tidak melakukan transaksi *Buy Back Shares* maupun *Buy Back Obligasi*.

8) Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Sesuai dengan ketentuan, PT. Bank BPD DIY tidak memberikan dana/bantuan/dukungan kepada kegiatan politik. Demikian pula kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh partai/golongan politik tertentu untuk tujuan kelompok tertentu.

9) *Corporate Social Responsibility*

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Bank, maka PT. Bank BPD DIY bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungan hidup (alam).

Pada tahun 2014 PT. Bank BPD DIY mengalokasikan dana untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* sebesar Rp.1.303.607.708,- (satu miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah) dalam rangka mendukung kegiatan sosial, pengembangan lingkungan hidup dan pendidikan. Pemberian dana CSR untuk kegiatan tersebut diharapkan menjadi suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan berkesinambungan.



Realisasi Penyaluran CSR Per Sektor :

No.	Sektor	Nominal (Rp)
1	Pendidikan	674.500.000,00
2	Kesehatan	455.650.000,00
3	Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi	98.748.000,00
4	UKM Center	74.709.708,00
	Total	1.303.607.708,00

Rincian kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh PT. Bank BPD DIY pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kegiatan CSR PT. Bank BPD DIY Tahun 2014			
No.	Materi Kegiatan	Sasaran	Nominal (Rp.)
1	Kegiatan Dialog Budaya dan Gelar Seni seri 64 - 67	Komunitas budaya "Yogya Semesta"	50.000.000,00
2	Bantuan Pendidikan (Beasiswa)	275 siswa tidak mampu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	412.500.000,00
3	Bantuan Pendidikan (Beasiswa)	Mahasiswi UGM berprestasi atas nama Winda Nur Afiani	6.000.000,00
4	Kegiatan Jogja Istimewa Craft Expo (UKM Center)	Pelaku UMKM Yogyakarta	13.838.298,00
5	Kegiatan Festival Malioboro (UKM Center)	Pelaku UMKM Yogyakarta	16.407.447,00
6	Seminar UKM Center (UKM Center)	Pelaku UMKM Yogyakarta	10.755.239,00
7	Gelar Produk Kreatif Nusantara (GPKN Expo) 2014 (UKM Center)	Pelaku UMKM Yogyakarta	20.851.064,00
8	Pameran Pembangunan 2014 (UKM Center)	Pelaku UMKM Yogyakarta	10.357.660,00
9	Pompa Hidram untuk Girimulyo Kulon Progo	Masyarakat Girimulyo Kulon Progo	8.748.000,00
10	Perpanjangan domain dan hosting (UKM Center)	Pelaku UMKM dan pengakses internet	2.500.000,00
11	Dana Pendidikan Mahasiswa	Mahasiswa	206.000.000,00
12	Bantuan Mobil Ambulans	PMI Kabupaten Sleman	226.050.000,00
13	Bantuan kepada Kelompok Pengrajin Keris	Kelompok Pengrajin Keris "Purosani" Imogiri	25.000.000,00
14	Penghijauan	Masyarakat wilayah	25.000.000,00

Gunungkidul			
15	BPD DIY Go Green HUT ke 53 PT. Bank BPD DIY	Masyarakat DIY	40.000.000,00
16	Bantuan Mobil Ambulans	PMI Kota Yogyakarta	229.600.000
TOTAL			1.303.607.708,00

Uraian pelaksanaan kegiatan CSR selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Sektor Pendidikan

Kegiatan sektor pendidikan meliputi pemberian bantuan pendidikan untuk pelajar yang tidak mampu, pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan, pelestarian budaya daerah, dan penguatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Kegiatan sektor pendidikan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Kegiatan dialog budaya dan gelar seni sebanyak 4 (empat) kali di Kepatihan bekerja sama dengan komunitas “YogyaSemesta”.
- Bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk 275 siswa dari kalangan tidak mampu di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
- Bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk Winda Nur Afiani, mahasiswi UGM berprestasi dari kalangan tidak mampu.
- Bantuan dana pendidikan mahasiswa diberikan kepada 81 mahasiswa universitas/ perguruan tinggi di wilayah DIY dari keluarga berpenghasilan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

2. Sektor Kesehatan

Kegiatan sektor kesehatan meliputi pengadaan sarana kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk penguatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Kegiatan sektor kesehatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Bantuan berupa mobil *ambulance* untuk PMI Kabupaten Sleman.
- Bantuan berupa mobil *ambulance* untuk PMI Kota Yogyakarta.

3. Sektor Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi

Kegiatan sektor lingkungan hidup, sosial dan ekonomi meliputi stimulus untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemulihan kondisi masyarakat, bantuan kebutuhan fisik, serta bantuan finansial. Kegiatan sektor lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan yaitu :

- Bantuan pompa hidram untuk Desa Purwosari Girimulyo Kulon Progo, diberikan kepada pengelola Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) “Tirto Katon Sari” yang berada di Desa Purwosari Girimulyo Kulon Progo.
- Penghijauan wilayah Gunungkidul yang dilaksanakan di dua tempat wisata, yaitu Baron Tekno Park dengan penanaman 10.000 pohon sengon dan 3.000 pohon jati, serta di kawasan Embung Sriten Desa Pilangrejo Nglipar dengan penanaman 1.000 bibit pohon manggis.
- BPD DIY Go Green yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-53 PT. Bank BPD DIY. Program yang dilaksanakan berupa penghijauan lingkungan dengan penanaman 2.000 bibit Pohon Mahoni. Lokasi penanaman tersebar di beberapa tempat antara lain :
 1. Kabupaten Sleman di Telogo Nirmolo Kaliurang dan Stadion Klebengan
 2. Kabupaten Kulon Progo di lingkungan Tugu Potlot dan ruas jalan Brosot-Sentolo
 3. Kabupaten Bantul di Stadion Sultan Agung, Komplek Pemda Baru Manding, ruas jalan Kabupaten, lingkungan Kampus UMY, lingkungan Pasar Niten, dan 5 (lima) Sekolah Adiwiyata

4. Kota Yogyakarta di Stadion Kridosono, bantaran Sungai Winongo, dan Lapangan Kopertis

- Bantuan peralatan untuk kelompok pengrajin keris “PUROSANI” Imogiri Bantul. Kelompok pengrajin keris “PUROSANI” terdiri dari masyarakat Desa Banyusumurup Girirejo Imogiri Bantul yang bermata pencaharian sebagai pengrajin keris dan pedok. Saat ini produksi keris dan pedok terkendala oleh terbatasnya peralatan untuk membuat kerajinan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank BPD DIY memberikan bantuan berupa peralatan untuk memproduksi keris dan pedok.

4. Sektor UKM Center

Kegiatan sektor UKM Center meliputi dukungan bagi peningkatan peran UKM Center di masyarakat. Kegiatan sektor UKM Center yang telah dilaksanakan meliputi 4 (empat) kali pameran produk UMKM dan 1 (satu) kali seminar UKM Center. Uraian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Jogja Istimewa Craf Expo merupakan kegiatan pameran kerajinan UKM dan budaya nusantara yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) DIY pada tanggal 17-22 Juni 2014 di Alun-alun Utara Yogyakarta. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan satu nasabah binaan dari Cabang Bantul, yaitu Pari Raja yang mempunyai usaha kerajinan dari kulit ikan pari.
- Pameran Festival Malioboro 2014 mengusung tema *Tourism-Heritage-Culinary & Youth Entrepreneur Festival*. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY pada tanggal 20-22 Juni 2014 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan tiga nasabah binaan, yaitu :
 - a. Greavy Susanto “Greavy Batik” : perdagangan batik, nasabah Kantor Cabang Senopati

- b. Edi Tiawan “Kusuma Jaya Batik Tulis & Cap” : produksi batik tulis dan cap, nasabah Kantor Cabang Sleman
 - c. Zazid : produk kulit ikan pari, nasabah Kantor Cabang Sleman
- Pameran Pembangunan 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY pada tanggal 14-18 Agustus 2014 di Exhibition Hall Gedung Kotak Lantai 1 Taman Pintar Jl. Panembahan Senopati Yogyakarta. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan empat nasabah binaan, yaitu :
 - a. Siwi Lestari : kerajinan vinyl, nasabah Kantor Cabang Sleman
 - b. Nurzazid : produk kulit ikan pari, nasabah Kantor Cabang Sleman
 - c. Murtini : Batik Sembung, produksi batik tulis dan cap, nasabah Kantor Cabang Wates
 - d. Tusiyah : tas rajut, nasabah Kantor Cabang Wates
- Gelar Produk Kreatif Nusantara (GPKN Expo) 2014 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY pada tanggal 11-14 September 2014 di Atrium Galeria Mall Yogyakarta. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan dua nasabah binaan, yaitu :
 - a. Siwi Lestari “Craft Shodia” : kerajinan vinyl, nasabah Kantor Cabang Sleman
 - b. Nur Alifah/Edi Tiawan “Kusuma Jaya Batik” : produksi batik tulis dan cap, nasabah Kantor Cabang Sleman
- Seminar UKM Center yang mengusung tema “UKM Naik Kelas Menyongsong MEA 2015”. Seminar dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2014 di Hall lantai 7 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY. Jumlah peserta yang hadir dalam seminar ini berjumlah 86 orang, yaitu nasabah UMKM Binaan PT. Bank BPD DIY, pelaku usaha, pengelola koperasi, kampus, asosiasi dan komunitas bisnis, LSM, dan mahasiswa. Seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Wildan Muhammadiyah (Pamella

Group), Cahyadi Joko Sukmono (Forbiz Indonesia), dan Sukarman (Sidji Batik).

10) Kode Etik

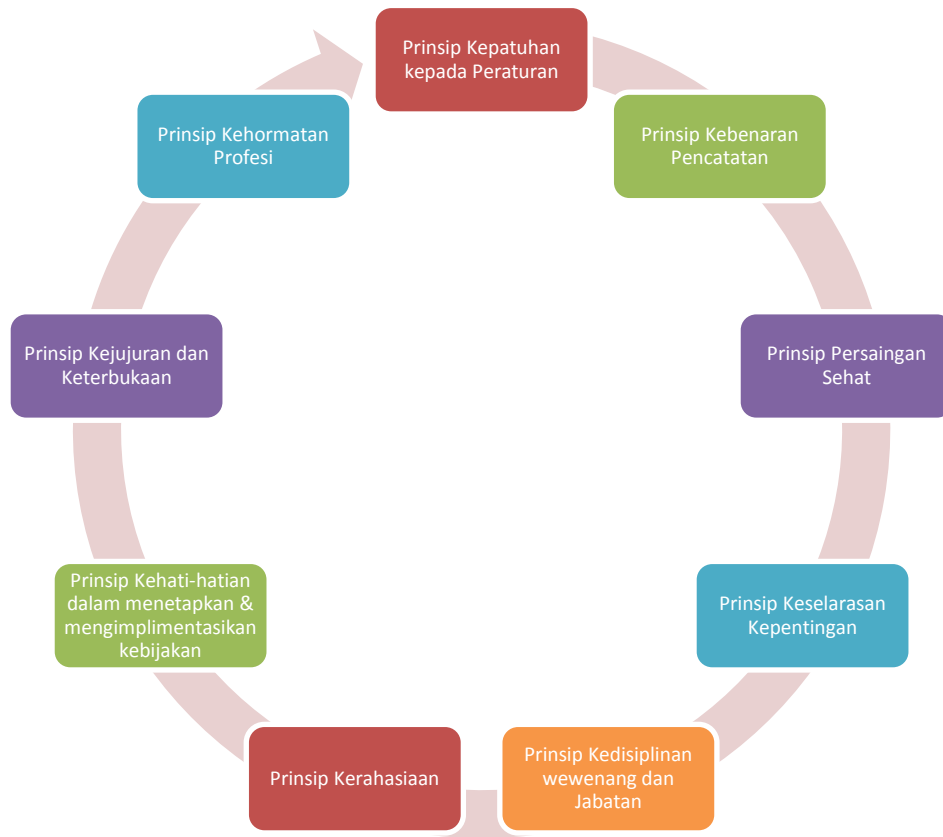
Semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko, maka diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Salah satu upaya memitigasi risiko adalah dengan menetapkan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketaatan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.

Bank telah menyusun Pedoman Kode Etik Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY yang merupakan komitmen Pengurus dan Pegawai untuk mewujudkan visi dan misi PT. Bank BPD DIY secara profesional dan beretika tinggi. Tujuan dari penyusunan Kode Etik adalah:

1. Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di perusahaan dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis
2. Memacu kepedulian terhadap isu etika dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung Nilai seperti Kepercayaan, Keterbukaan, Kejujuran, dan Akuntabilitas dalam setiap kesepakatan
3. Mempromosikan dan menjaga standar etika yang tinggi, patuh pada undang-undang dan peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional, serta menjamin kode etik ini diperhatikan dan melekat pada pegawai perusahaan
4. Membangun kerangka kerja perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi bagi semua pegawai di perusahaan
5. Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realitas kepada Manajemen, Pimpinan, dan Pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik sebagai bagian dari Budaya Perusahaan

Secara garis besar Kode Etik Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip Etika Kerja :



2. Isi Kode Etik :



Hasil Penilaian Good Corporate Governance PT. Bank BPD DIY
Periode : Desember 2014

NO.	FAKTOR PENILAIAN	SKOR 1-5	BOBOT	SKOR TERBOBOT
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,92	10%	0,19
	1.1 Governance Structure	1	35%	0,49
	1.2 Governance Process	2	35%	0,77
	1.3 Governance Outcome	2	30%	0,66
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,92	20%	0,38
	2.1 Governance Structure	1	35%	0,49
	2.2 Governance Process	2	35%	0,77
	2.3 Governance Outcome	2	30%	0,66
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	1,92	10%	0,19
	3.1 Governance Structure	1	35%	0,49
	3.2 Governance Process	2	35%	0,77
	3.3 Governance Outcome	2	30%	0,66
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	1,40	10%	0,14
	4.1 Governance Structure	1	35%	0,49
	4.2 Governance Process	1	35%	0,49
	4.3 Governance Outcome	1	30%	0,42
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	1,92	5%	0,10
	5.1 Governance Structure	1	35%	0,49

	5.2	Governance Process	2	35%	0,77
	5.3	Governance Outcome	2	30%	0,66
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern		2,20	5%	0,11
	6.1	Governance Structure	2	35%	0,77
	6.2	Governance Process	2	35%	0,77
	6.3	Governance Outcome	2	30%	0,66
7.	Penerapan Fungsi Audit Extern		1,40	5%	0,07
	7.1	Governance Structure	1	35%	0,49
	7.2	Governance Process	1	35%	0,49
	7.3	Governance Outcome	1	30%	0,42
8.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal		2,20	7,5%	0,17
	8.1	Governance Structure	2	35%	0,77
	8.2	Governance Process	2	35%	0,77
	8.3	Governance Outcome	2	30%	0,66
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar		1,40	7,5%	0,11
	9.1	Governance Structure	1	35%	0,49
	9.2	Governance Process	1	35%	0,49
	9.3	Governance Outcome	1	30%	0,42
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal		1,92	15%	0,29

	10.1	Governance Structure	1	35%	0,49
	10.2	Governance Process	2	35%	0,77
	10.3	Governance Outcome	2	30%	0,66
11.	Rencana Strategis Bank		2,72	5%	0,14
	11.1	Governance Structure	3	35%	1,05
	11.2	Governance Process	2	35%	0,77
	11.3	Governance Outcome	3	30%	0,90
Total Skor : 1,88 Peringkat : 2					